

SOLUSI STRATEGIS KEMISKINAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

Ipah Ema Jumiati*) Ayuning Budiati), Riny Handayani***) Rahmawati*****)**

*) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

***) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*****) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: *)ipah.ema@untirta.ac.id, **)ayoekomara@gmail.com, ***)gmriny@yahoo.co.id,
*****)rahmawati@untirta.ac.id

ABSTRACT

It is not easy to build understanding of poverty because it involves various dimensions. Understanding poverty is very diverse, ranging from the inability to meet basic consumption needs and improve conditions to a broader understanding that includes social and moral components. According to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 131 Year 2015 concerning Determination of Underdeveloped Regions in 2015 - 2019. Pandeglang Regency and Lebak Regency are included in the category of disadvantaged areas. Pandeglang Regency has a poverty rate of 9.74 percent, followed by Lebak Regency 8.64 percent, Tangerang Regency 5.39 percent, Serang Regency 4.63 percent, Tangerang City 4.95 percent, Cilegon City 3.52 percent, Serang City 5, 57 percent, and South Tangerang City 1.76 percent. For the Solidarity Line in Pandeglang District the latest data is in the range of 267,752 rupiah / capita / month, the sixth lowest after Lebak Regency (246,389) and Serang Regency (256,660). This research was conducted to analyze the causal factors and explore the potential for poverty alleviation in Pandeglang Regency, Banten Province. In this study using quantitative methods and supported by qualitative. Quantitative methods have the advantage of validating natural science: explicit, standardized procedures; precise numerical measurement; and replication. (Neuman, 2006). While the qualitative approach used as a support is a process of research and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problems in which this approach, the researcher makes a complex picture, examines words, detailed reports from the viewpoint of respondents and conducts studies on situations which is natural (Creswell 1998). Research Results Show that the regional gap index represented by the Gini Ratio in Pandeglang District obtained an average Gini Ratio of 0.20 which can be categorized as Low Inequality, below the 2017 Province Gini Ratio in Banten which is 0.380 and the National Gini Ratio of 0.320. With Low Inequality indicates that most households have income that does not differ greatly from one another. However, other data obtained from observations and data collection in the field, critical area 1 is much lower Gini Rationya (0.15) compared to critical area 3 represented by Karangtanjung District (0.32). This means that in Sobang District the income gap between communities is relatively lower than in Karangtanjung District. Furthermore, a concerted effort is needed so that the gap does not get worse so that it triggers social jealousy among the community. The factors causing poverty gap in Pandeglang Regency, Banten Province are: a) Low Level of Education; b) Community life patterns; c) Skill limitations; d) Low population mobility; e) Number of family dependents.

Keywords: Potential, Poverty Alleviation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak mungkin dapat dicapai bila penduduk masih dibelenggu kemiskinan. Sebagaimana diungkap oleh Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1997, akar masalah yang menyebabkan kemiskinan adalah ketiadaan akses dan kontrol orang miskin atas sumber daya yang ada. Maksudnya, karena monopoli oleh kelompok dan negara tertentu dengan sistem ekonomi neoliberalnya, maka yang mempunyai akses terhadap segala macam kekuasaan, baik ekonomi, politik, budaya, maupun sosial adalah mereka-mereka yang kaya dan berpunya.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Diantaranya dengan mengukur Index Kedalaman Kemiskinan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten dengan luas 2.746,31 km² atau 29,98% dari luas wilayah Provinsi Banten

dan terbagi dalam 35 kecamatan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masuk dalam kategori daerah tertinggal. Kabupaten Pandeglang terdata memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,74 persen, disusul Kabupaten Lebak 8,64 persen, Kabupaten Tangerang 5,39 persen, Kabupaten Serang 4,63 persen, Kota Tangerang 4,95 persen, Kota Cilegon 3,52 persen, Kota Serang 5,57 persen, dan Kota Tangerang Selatan 1,76 persen. Untuk Garis Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang data terbaru berada pada kisaran 267.752 rupiah/kapita/bulan, terendah keenam setelah Kabupaten Lebak (246.389) dan Kabupaten Serang (256.660). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (Banten Dalam Angka, BPS Provinsi Banten 2017).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di wilayah Kabupaten Pandeglang;
- b. Mengidentifikasi potensi-potensi di wilayah Kabupaten Pandeglang yang dapat dijadikan sebagai faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya tentang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dari aspek terapan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang efektif bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang serta guna dijadikan bahan refleksi model untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan strategis yang efektif.

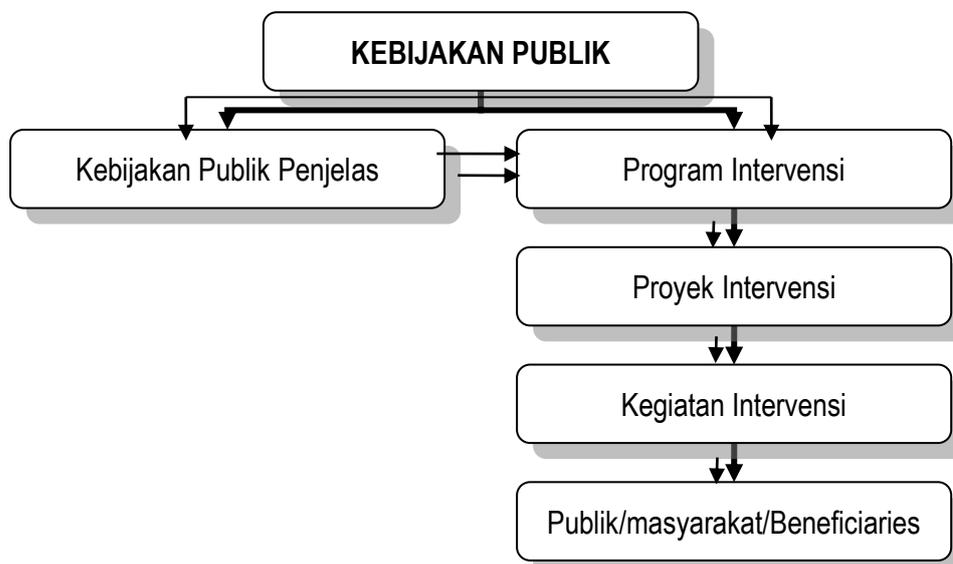
STUDI PUSTAKA

Konsep Implementasi Kebijakan Publik.

Berkenaan dengan uraian studi implementasi, maka setidaknya perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Presmann dan Wildavsky (1979:21)

juga mengurai makna implementasi dengan menyatakan bahwa *implementation maybe viewed as process of interaction between the setting of goals and action geared to achievement them*. Implementasi dapat dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Presmann dan Wildavsky melihat implementasi kebijakan sebagai mata rantai yang menghubungkan titik awal “setting of goal” dengan titik akhir “achievement them.

Selanjutnya, untuk implementasi kebijakan publik, maka Dwidjowijoto, (2004: 159) melihat ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.

(Sumber: Dwidjowijoto, 2004:159)

Gambar 2.1. tersebut menunjukkan dengan jelas susunan implementasi kebijakan dalam bentuk program, ke proyek dan ke kegiatan. Pandangan serupa dari Gordon yang Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah Dinamika kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan politik, dalam bentuk peraturan perundangan maupun program kegiatan dengan melibatkan tidak hanya aparat pelaksana sampai pada tingkat street level bureaucracy, tetapi juga melibatkan masyarakat, kegiatan mana menciptakan peluang bagi masyarakat melibatkan dirinya dalam mengakses kepentingannya dan tercapainya kepentingan pengambil kebijakan.

Konsep Kemiskinan.

Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam konteks yang demikian, maka untuk memahami kemiskinan dapat dilihat dari pandangan Sudibyo (1995:11) bahwa kemiskinan adalah kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan dasar. Pandangan serupa dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi

dikutip Keban (2006) bahwa Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan dari BKKBN (1996:10) kemiskinan dianggap sebagai Suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Disamping pandangan ahli yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa ahli juga memetakan penyebab kemiskinan dalam 3 (tiga) kategori yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural dapat dikatakan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah baik pada segi sumberdaya manusianya maupun sumberdaya alamnya atau kemiskinan konsekuensial meminjam istilah David Cox (dalam Suharto, 2004:132), namun, Galbraith (1979:13) menganggap faktor-faktor alamiah kurang bisa dijadikan penjelasan mengenai terjadinya kemiskinan. Ia menunjuk Jepang, Singapura, Taiwan, Hongkong dan Korsel

sebagai bukti. Secara alamiah negara-negara tersebut bukanlah negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun demikian, dalam kenyataannya, kelima negara di atas tidak termasuk negara miskin. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan, yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan didalam masyarakat itu. (Suharto, 2004:137; Baswir, 1995:20; Mas' oed 1994:135). Kemiskinan model ini menurut Oscar Lewis dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya atau faktor internal yang datang dari diri si miskin itu sendiri. (Suharto, 2004:138). Pandangan tersebut oleh Chambers (1988:132) dianggap sebagian besar melesat, karena banyak studi kasus yang menunjukkan bahwa orang-orang miskin pekerja keras, cerdas, dan ulet. Mereka harus memiliki sifat-sifat seperti itu untuk dapat bertahan hidup dan melepaskan diri dari belenggu rantai kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif teknik deskriptif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan

kuantitatif, ditekankan netralitas dan objektivitas. Studi kuantitatif, diandalkan pada mengandalkan prinsip replikasi, mematuhi standarisasi prosedur, ukuran dengan angka, dan analisis data dengan statistik dalam hal meminimalkan atau menghilangkan hal yang subjektif. Isu integritas dalam penelitian kuantitatif mencerminkan pendekatan sains alami. Riset sosial kuantitatif memiliki keunggulan validasi sains alami: eksplisit, prosedur standar; pengukuran numerik yang tepat; dan replikasi. (Neuman, 2006). Sedangkan pendekatan kualitatif yang digunakan sebagai pendukung penelitian merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia dimana pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell 1998).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri atas : data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi atau dinas yang terkait dengan penelitian. Selain itu dikumpulkan juga dari buku-buku dan laporan penelitian

3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Slovin dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \alpha^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

α = margin error

Jumlah sampel berasal dari populasi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang terdata sebagai wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dengan kategorisasi RTM Kritis 1 adalah Kecamatan Cikeusik dan Kecamatan Panimbang, Cigeulis, Bojong, Angsana, Mandalawangi,

Sukaesmi, Labuan, Karangtanjung, Cibaliung, Cibitung dan Sobang sebagai kecamatan dengan kategorisasi RTM Kritis 2 yang berjumlah 15.898 RTM (Sumber : Pemutakhiran Basis Data Terpadu Provinsi Banten, 2015). Wilayah tersebut selain merupakan kantong kemiskinan kritis 1 sampai kritis 3 di Kabupaten Pandeglang juga mewakili secara geografis wilayah Kabupaten Pandeglang

Dengan margin error $e = 5\%$, setelah dihitung dan dikenakan diperoleh jumlah sampel sebanyak 400 Rumah Tangga Miskin (RTM). Jumlah masing-masing sampel RTM di setiap kecamatan secara jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Jumlah Populasi dan Sampel

Kecamatan	Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin)	Sampel Tingkat Presisi 5%
Cikeusik	1.015	25
Panimbang	4.214	104
Cigeulis	2.431	60
Bojong	827	21
Mandalawangi	2.207	55
Angsana	624	16
Sukaesmi	1.397	35
Labuan	663	17
Karangtanjung	665	17
Cibaliung	647	16
Cibitung	532	14
Sobang	676	17
Total	15.898	397

Sumber : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten 2015, Pengolahan Data 2019.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan dari 335 desa/kelurahan (13 kelurahan dan 322 Desa) dengan luas wilayah daerah sebesar 2.746,89 kilometer persegi (km²). Kecamatan Cikeusik merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pandeglang dengan luas sekitar 322.76 km² sedangkan Kecamatan Labuan merupakan kecamatan terkecil dengan luas sekitar 15,66 km²

Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang sebesar 1.205.203 jiwa, dengan komposisi 615.297 jiwa penduduk laki-laki dan 589.906 penduduk perempuan. Kecamatan Labuan merupakan wilayah yang penduduknya paling banyak di Kabupaten Pandeglang yakni 56.947 jiwa, sedangkan Kecamatan Koroncong paling sedikit jumlah penduduknya yakni 18.720 jiwa. Wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di Kecamatan Labuan yakni 3.636,46 jiwa/km² sedangkan Kecamatan Sumur merupakan wilayah yang paling jarang penduduknya yakni 93,21

jiwa/km² (Kabupaten Pandeglang Dalam Angka, 2018)

Berdasarkan rasio jenis kelamin, hanya Kecamatan Mekarjaya yang memiliki nilai Sex Ratio dibawah 100 yaitu 99,87 yang berarti terdapat 99 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya hampir sama. Sedangkan kecamatan lainnya memiliki sex ratio di atas 100, dengan sex ratio terbesar di Kecamatan Cadasari yaitu sebesar 111,80.

Gambaran Ketimpangan Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2016, pola kemiskinan di Provinsi Banten secara umum mengalami penurunan. Hal ini dijelaskan oleh data semakin meningkatnya batasan garis kemiskinan di Provinsi Banten. Pada Maret 2011 garis kemiskinan di Provinsi Banten adalah 226.662 rupiah dan pada September 2016 terdata sebesar 373.365 rupiah dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan lagi menjadi 386 753.

Selengkapnya angka kemiskinan di Provinsi Banten adalah sebagai berikut : Kabupaten Pandeglang 9,74 persen, Kabupaten Lebak 8,64 persen, Kabupaten Tangerang 5,39 persen, Kabupaten Serang 4,63 persen, Kota Tangerang 4,95 persen, Kota Cilegon 3,52 persen, Kota Serang

Tingkat Kemiskinan Pada Tingkat Rumah Tangga Desa di Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner di wilayah penelitian, dapat diketahui karakteristik responden mayoritas adalah rumah tangga dengan kepala tidak menamatkan pendidikan dasarnya.

Masih belum memadainya tingkat pendidikan masyarakat, dimana angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pandeglang tahun 2016 adalah 6,82 tahun jauh di bawah rata-rata Provinsi Banten sebesar 8,37 tahun (standar nilai maksimum 15

Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi

5,57 persen, dan Kota Tangerang Selatan 1,76 persen. Untuk Garis Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang data terbaru berada pada kisaran 285.822 rupiah/kapita/bulan, terendah keenam setelah Kabupaten Lebak (261.880) dan Kabupaten Serang.

keluarga yang berada pada rentang usia produktif mendekati non produktif (dominasi pada umur 40-49 tahun sebanyak 27,5%) Sedangkan dari tingkat pendidikannya, mayoritas kepala keluarga hanya menyelesaikan pendidikan dasarnya (52,8%) bahkan sebanyak 14,3% responden

tahun, UNDP). dan jumlah total warga buta aksara di Kabupaten Pandeglang relatif tinggi yakni 19.000 jiwa, paling banyak di daerah Selatan yaitu Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cibitung, Cibaliung dan sekitarnya.

perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Berdasarkan data di atas diperoleh fakta

bahwa di sekitar wilayah responden terdapat penduduk pendatang (migran). Sebanyak 61,8% responden membenarkan hal tersebut, dapat dipastikan terjadi penambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh migrasi dan hal ini harus diperhatikan pemerintah setempat karena telah disebutkan sebelumnya penambahan jumlah penduduk akan berkontribusi pada keadaan kemiskinan yang semakin timpang.

Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Kemiskinan Di Kabupaten Pandeglang;

Faktor-faktor penyebab kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, dilihat berdasarkan wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dengan kategorisasi Rumah Tangga Miskin (RTM) Kritis 1 adalah Kecamatan Cikeusik, Ciguelis dan Mandalawangi. Kecamatan Panimbang, Bojong, Angsana, Sukaresmi, Labuan, Cibaliung, Cibitung sebagai RTM Kritis 2. Kecamatan Sobang dan Karangtanjung sebagai kecamatan dengan kategorisasi RTM Kritis 3 dengan jumlah total sebanyak 15.898 RTM (Sumber : Pemutakhiran Basis Data Terpadu Provinsi Banten, 2015). Wilayah tersebut selain merupakan kantong kemiskinan di Kabupaten Pandeglang yang juga mewakili secara geografis wilayah di Kabupaten Pandeglang. Pertimbangan pembagian wilayah di atas juga dilakukan

dengan membagi wilayah sesuai dengan tipologinya yaitu: 1) berdasarkan jenis usaha (pertanian dan non pertanian); 2) jumlah penduduk jarang, sedang dan padat; dan 3) letak geografis (pesisir dan non pesisir). Dengan pembagian wilayah tadi, diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam program-program pengurangan kemiskinan dan pencegahan pertumbuhan penduduk miskin.

Melihat ketiga wilayah di atas, faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di wilayah pedesaan dan faktor penciri rumah tangga miskin di Kabupaten Pandeglang tentunya akan beragam, berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, bahkan dari satu waktu ke waktu yang lain. Dalam hal ini perlu disesuaikan dengan karakteristik tipologi desa dan faktor penciri rumah tangga miskin Kabupaten Pandeglang, agar dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi ke depan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi untuk menjawab permasalahan dan keterbatasan-keterbatasan penelitian tentang kemiskinan.

Berdasarkan hasil yang didapat di lapangan dan didukung oleh data-data sekunder sebelumnya, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dalam hal pola pikir. Dengan pendidikan yang rendah tidak mampu untuk merubah pola pikir seseorang untuk berorientasi ke depan (Todaro : 2000). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa aparat kecamatan dan pihak yang terkait, terdata bahwa faktor utama penyebab umumnya kemiskinan di wilayah Kabupaten Pandeglang adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini didukung oleh beberapa hasil wawancara yang berhasil peneliti lakukan yakni sebagai berikut :

“Ya faktor utamanya yaitu masalah pendidikannya (Kasie Kessos Cigeulis, 2 Nov 2018)

“Itu dari pendidikan karena bagaimanapun pendidikan akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, minimal untuk lulusan SMA akan mendapatkan pekerjaan yang layak yang tentunya itu akan berpengaruh pada penghasilannya. Untuk masyarakat yang muda-muda rata-rata lulusan SMA, yang tua-tua adalah lulusan SD atau sekolah rakyat.” (Kasie Kessos Panimbang, 3 November 2018)

“Yang paling pertama yaitu dari segi sumber daya manusianya yang memiliki pendidikan rendah. 40% masyarakat di Mandalawangi yaitu berpendidikan Sekolah Dasar, sedangkan sisanya SLTP, SLTA dan perguruan tinggi.” (Aparat Kecamatan Mandalawangi, November 2018)

2. Pola Hidup/Budaya/Kultural

Pola hidup masyarakat yang cenderung santai atau dapat dikatakan memiliki motivasi yang rendah menjadi salahsatu penyebab kemiskinan di wilayah ini. Masih rendahnya arus migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar ternyata juga berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan :

“faktor lingkungan yang menunjang karena di sini kan kebanyakan pribumi belum banyak pendatang sehingga masih belum adanya persaingan.” (Kasie Kessos Cigeulis, 2 November 2018)

Selain pola hidup seperti yang telah dijelaskan di atas yakni rendahnya motivasi masyarakat yang salahsatunya akibat rendahnya arus migrasi di wilayah Pandeglang, pola hidup yang setidaknya menyebabkan kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah ini adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, budayanya yang merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan akan kondisi kemiskinan mereka. Hal ini diperkuat dengan salahsatu hasil wawancara yang dilakukan, yakni sebagai berikut:

“kadang dikita ini yang disebut kemiskinan turunan, jadi kadang, bukan turunan artinya dari dulunya miskin nggak jadi maksudnya orangtuanya miskin, ketika orang tuanya meninggal bantuan-bantuan kemiskin turun ke anaknya, kemiskinan turunan itu ya anaknya jadi penerimaan

bantuan.“ (Kasie Kessos Karangtanjung, 3 November 2018)

3. Keterbatasan Keterampilan/Skill

Sebagian responden yang diminta pendapatnya, menunjukkan hasil sebagian besar tidak memiliki usaha sampingan karena terbatasnya keterampilan, Mereka tidak memiliki *skill* untuk bisa mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Dengan demikian jumlah produksi yang relatif rendah sehingga mempengaruhi rendahnya pendapatan. Fakta ini diperkuat juga dengan hasil wawancara yakni sebagai berikut :

*“Penyebab utamanya kemungkinan di sini itu tidak ada lapangan kerja, tidak ada orang yang punya skill masih dibilang sedikitlah baru ada juga.”*Kasi Kessos Kecamatan Sobang (IH) wawancara 1 November 2018

“Mungkin yang pertama karena kurangnya SDM, pola pikir yang masih rendah, bisa jadi juga karena pemalas nggak mau berfikir, terus dia nggak punya inovatif, terus mungkin karena lapangan kerja yang kurang, setelah itu dianya tidak mau inovatif dan tidak punya kreativitas.” (Kasie Kessos Labuan, 4 November 2017) *Yang paling utama adalah faktor sumber daya manusia, terutama dengan keterampilan termasuk dengan lapangan pekerjaan tetapi ketika lapangan pekerjaan ada tetapi karena tidak memiliki keterampilan makanya susah kalah saing dengan orang lain* (Kasie Kessos Karangtanjung, 1 November 2018).

Keterbatasan keterampilan/skill juga berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang.

Artinya masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) turut berkontribusi dalam menunjang terjadinya kesenjangan kemiskinan di wilayah penelitian.

Mobilitas Penduduk Rendah

Faktor penyebab kesenjangan kemiskinan lainnya adalah, mobilitas pekerjaan di Kabupaten Pandeglang. Mobilitas adalah berpindah-pindah atau bergerak. Di Kabupaten Pandeglang mobilitas pekerjaannya rendah, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran akibat kurang variatifnya lapangan pekerjaan.

Migrasi dalam arti luas ialah perubahan tempat tinggal secara permanen, tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya yaitu apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa, serta tidak ada perbedaan antar perpindahan di dalam negeri dan/atau keluar negeri.

Todaro dalam (Khodijah, 2008) menyatakan migrasi merupakan suatu proses yang sangat selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan, dan demografi tertentu, maka pengaruhnya terhadap faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi.

4. Jumlah Tanggungan Keluarga

Berdasarkan data yang didapat sebelumnya, rata-rata keluarga di Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah

anak di atas 3 seperti yang terdata di Kampung Muncang Labuan, Kampung Bantar Panjang Desa Banyubiru, Kampung Hasem Desa Kiara Payung, Kampung Kuta Desa Kuta Karang Kecamatan Cibitung, Desa Cikalong dan beberapa wilayah lainnya yang juga teridentifikasi sebagai wilayah dengan RTM wilayah kritis 1,2 dan 3. Penduduk yang memiliki jumlah anak lebih dari 3 juga berkaitan langsung dengan prosentase tinggi untuk kategori menikah di usia yang relatif muda. Dari 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang terdapat 8 Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian besar untuk menurunkan Usia Kawin Pertama (UKP) adalah: Kecamatan Sumur, Cimanggu, Patia, Munjul, Cibaliung, Kaduhejo, Panimbang dan Karang Tanjung .

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Indeks kesenjangan daerah yang diwakili oleh Gini Ratio di Kabupaten Pandeglang diperoleh rata-rata Gini Ratio 0,20 yang dapat dikategorikan termasuk **Ketimpangan Rendah**, di bawah Gini Ratio Provinsi Banten Tahun 2017 yakni 0,380 dan Gini Ratio Nasional yakni 0,320. Dengan Ketimpangan Rendah menandakan sebagian besar rumah tangga memiliki

pendapatan yang tidak berbeda jauh satu sama lain. Namun data lain yang didapatkan dari hasil pengamatan dan pendataan di lapangan, wilayah kritis 1 jauh lebih rendah Gini Rationya (0,15) dibandingkan wilayah kritis 3 yang diwakili oleh Kecamatan Karangtanjung (0,32). Artinya, di Kecamatan Sobang kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan di Kecamatan Karangtanjung. Selanjutnya perlu upaya bersama agar kesenjangan yang terjadi tidak semakin parah sehingga memicu kecemburuan sosial diantara masyarakat.

Faktor-faktor penyebab kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten adalah sebagai berikut : a) **Rendahnya Tingkat Pendidikan**. Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dalam hal pola pikir. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai akses yang baik terhadap informasi, pengetahuan dan teknologi. Sehingga akan mempengaruhi kemampuannya dalam berpikir untuk mengembangkan usahanya agar memiliki pendapatan yang lebih tinggi; b) **Pola hidup masyarakat** yang cenderung santai atau dapat dikatakan memiliki motivasi yang rendah menjadi salahsatu faktor penyebab kemiskinan di wilayah ini. Masih

rendahnya arus migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar ternyata juga berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Selain pola hidup seperti yang telah dijelaskan di atas yakni rendahnya motivasi masyarakat yang salahsatunya akibat rendahnya arus migrasi di wilayah Pandeglang, pola hidup yang menyebabkan kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah ini adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, budayanya yang merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan akan kondisi kemiskinan mereka.; c) **Keterbatasan keterampilan/skill** juga berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Artinya masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) turut berkontribusi dalam menunjang terjadinya kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang; d) **Mobilitas penduduk yang rendah** juga menjadi salah satu faktor penyebab kesenjangan kemiskinan. Mobilitas adalah kegiatan berpindah-pindah atau bergerak dari penduduk. Di Kabupaten Pandeglang mobilitas penduduk rendah dicirikan oleh mobilitas pekerjaan yang juga rendah, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran akibat kurang variatifnya lapangan pekerjaan; e) **Jumlah Tanggungan Keluarga.** Rata-rata

keluarga di Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah anak di atas 3 seperti yang terdata di Kampung Muncang Labuan, Kampung Bantar Panjang Desa Banyubiru, Kampung Hasem Desa Kiara Payung, Kampung Kuta Desa Kuta Karang Kecamatan Cibitung, Desa Cicalong dan beberapa wilayah lainnya yang juga teridentifikasi memiliki penduduk yang menikah di usia yang relatif muda. Dari 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang terdapat 8 Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian besar untuk menurunkan Usia Kawin Pertama (UKP) yakni Kecamatan Sumur, Cimanggu, Patia, Munjul, Cibaliung, Kaduhejo, Panimbang dan Karang Tanjung.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan berupa rekomendasi, berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama prioritas pada peningkatan pendidikan penduduk miskin. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah merancang paket pelatihan yang menekankan pada peningkatan skill dan praktek untuk dapat bekerja dan berusaha lebih produktif. Target sasaran dari program ini adalah kepala Rumah Tangga Miskin yang memiliki tingkat pendidikan SLTP ke bawah.

2. Pelibatan penduduk (masyarakat) dalam setiap aspek pembangunan dan program pemerintah.
3. Membentuk *champion* (orang lokal yang memiliki pengalaman dan ilmu) di tingkat desa/ kecamatan sebagai penggerak.
4. Mengembangkan peluang usaha di luar pertanian (*home industries*). Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan.
5. Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, pemerintah bisa melakukan peningkatan minat wirausaha melalui pemberian modal kerja dan pembinaan bagi rumah tangga miskin yang berusaha disektor informal. Dengan bantuan tersebut, usaha yang dilakukan rumah tangga miskin secara ekonomis dapat berkembang dan menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta : LP3ES.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.
- Gilbraith, Jhon Kenneth. 1979. *Hakekat Kemiskinan Massa*, (Terj. Tom Anwar). Jakarta : Sinar harapan.
- Keban, T. Yeremias. 2006. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Nugroho, I & Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Pemutakhiran Basis Data terpadu Provinsi Banten Tahun 2015 Tentang Standar Nilai Maksimum 15 Tahun, UNDP.
- Remi S. dan Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif* . Jakarta : Kanisius.
- Suharto, Edi. 2004. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 1979. *Implementation*. Barkley and Los

Angeles: University of California
Press

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 131 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun
2015-2019.

Sumber Dokumen:

BPS Provinsi Banten. 2017. *Perhitungan
Dan Analisis Kemiskinan Makro
Indonesia*. Badan Pusat Statistik
Provinsi Banten.

BPS Provinsi Banten. 2017. *Banten Dalam
Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi
Banten.

BPS Kabupaten Pandeglang. 2017.
Pandeglang Dalam Angka . Badan
Pusat Statistik Kabupaten
Pandeglang.

BPS Kabupaten Pandeglang. 2017. *Statistik
Kesejahteraan Daerah*. Badan Pusat
Statistik Kabupaten Pandeglang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.